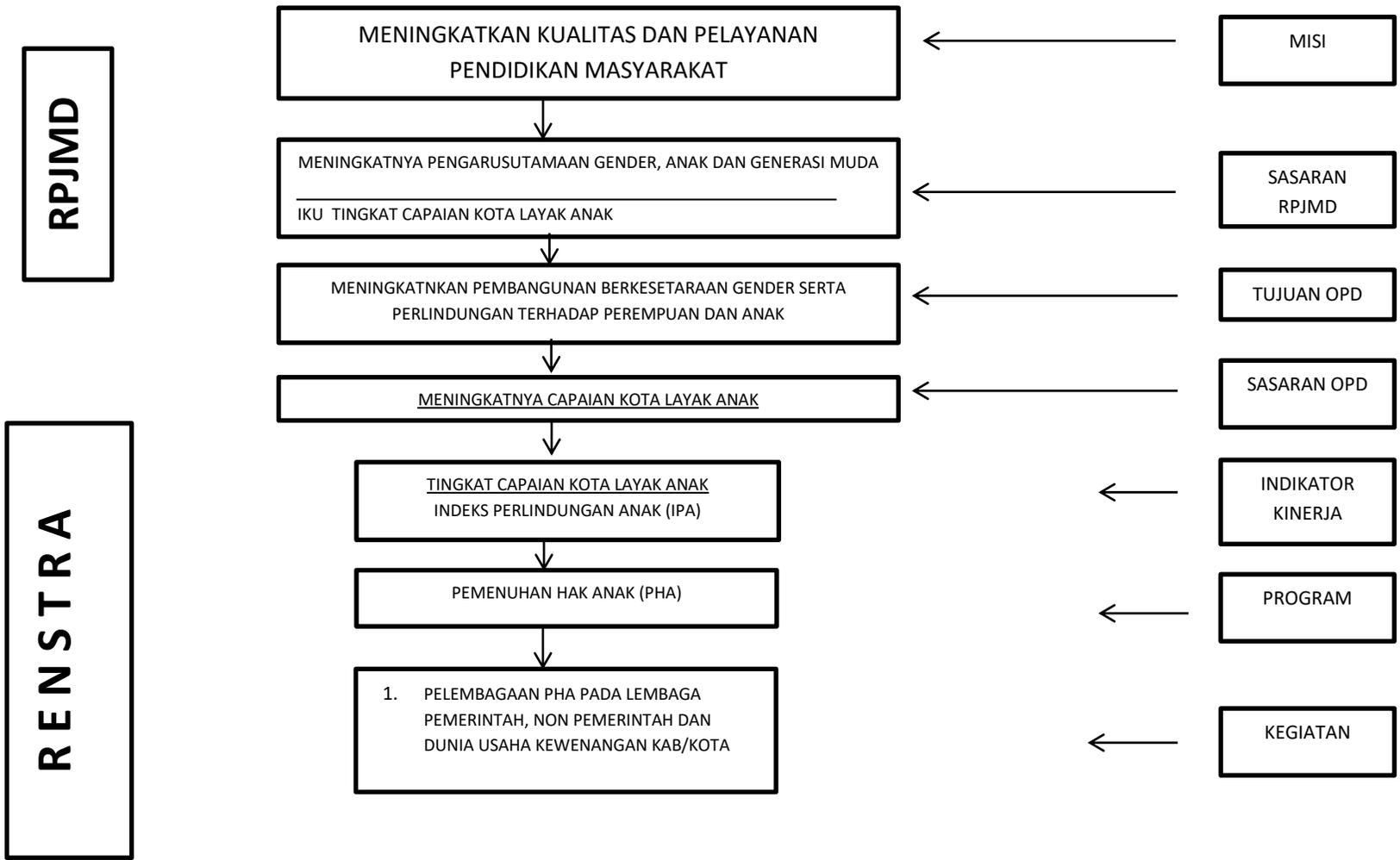


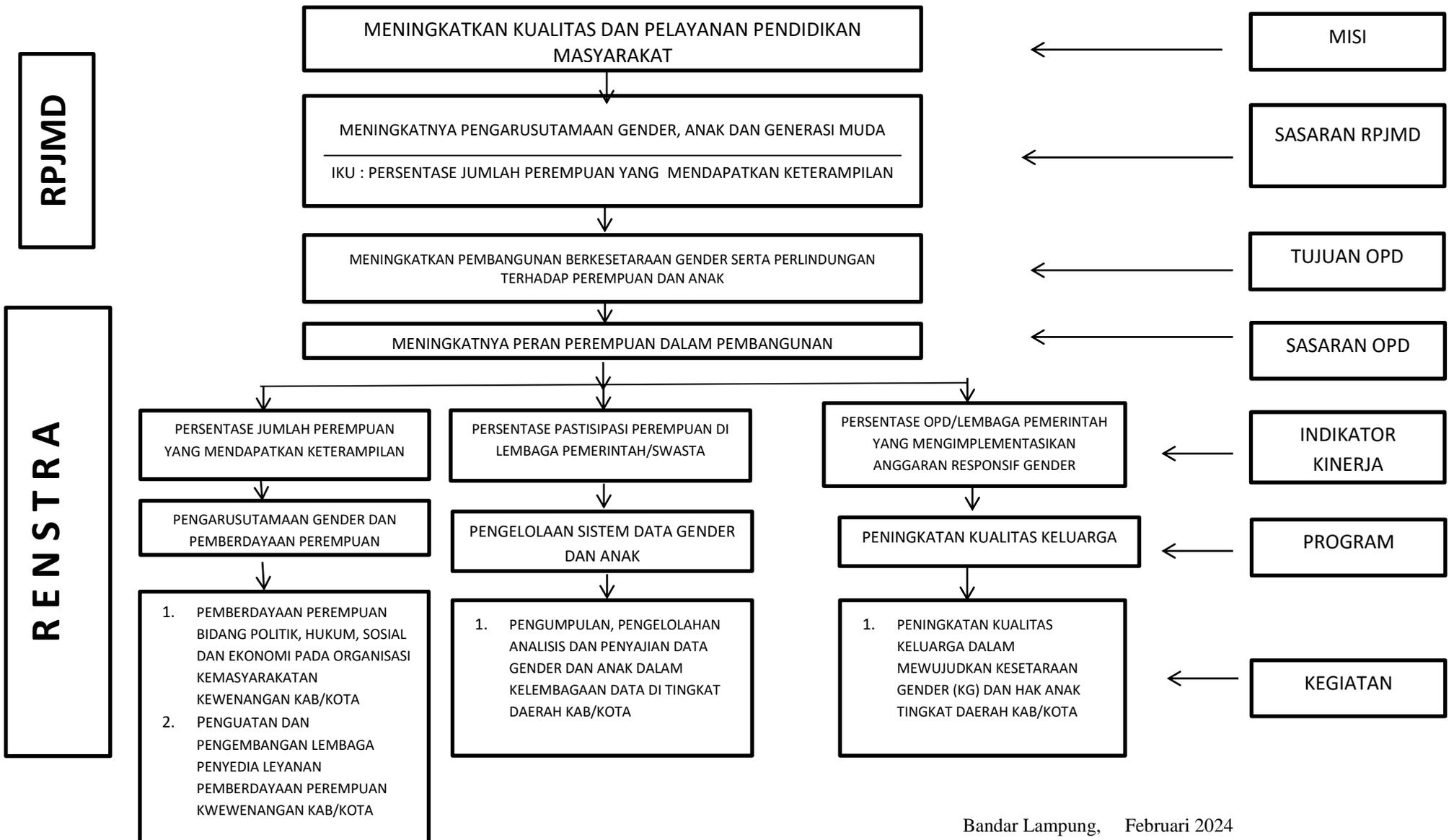
# CAS CADING DINAS PPPA



Bandar Lampung, Februari 2024  
**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung**

**Dra. MARYAMAH**  
NIP. 19670620 199303 2 005

# CAS CADING DINAS PPPA



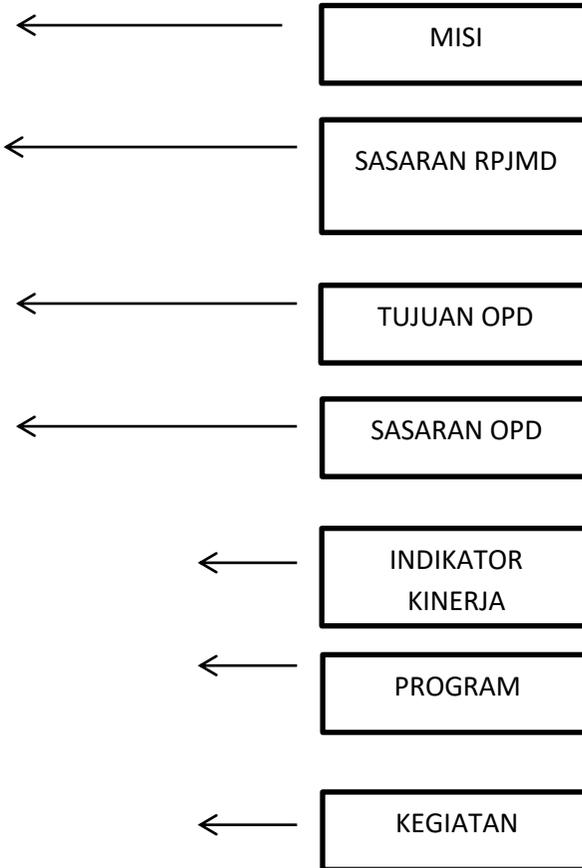
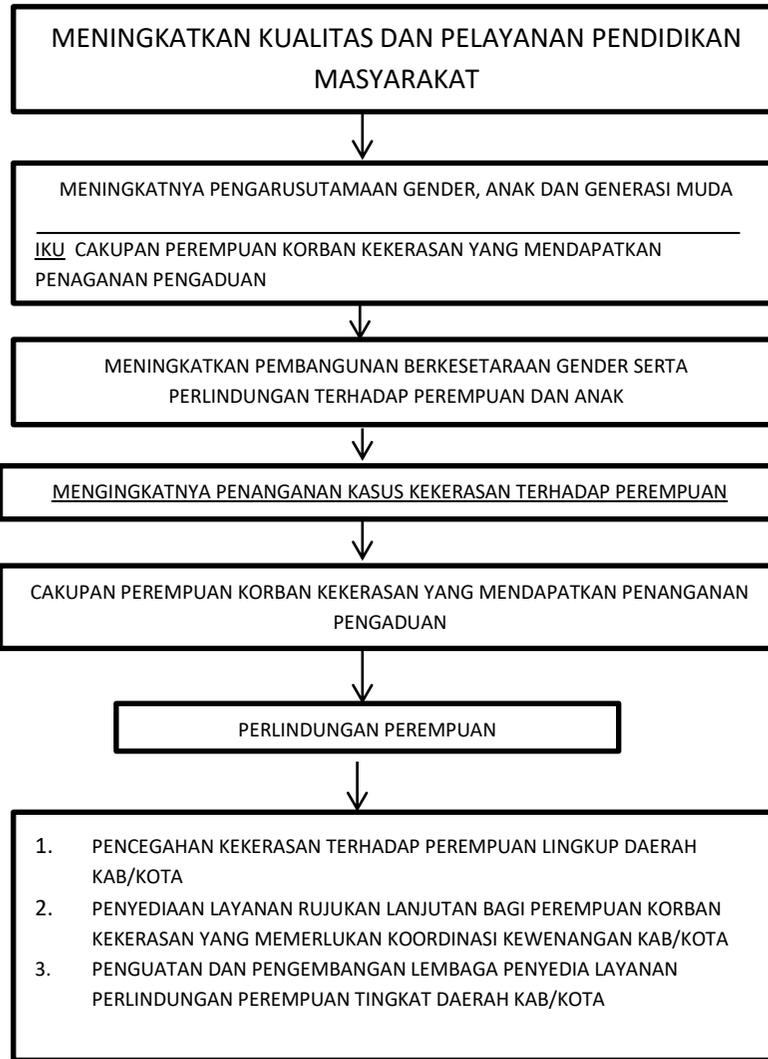
Bandar Lampung, Februari 2024  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

**Dra. MARYAMAH**  
NIP. 19670620 199303 2 005

# CAS CADING DINAS PPPA

RPJMD

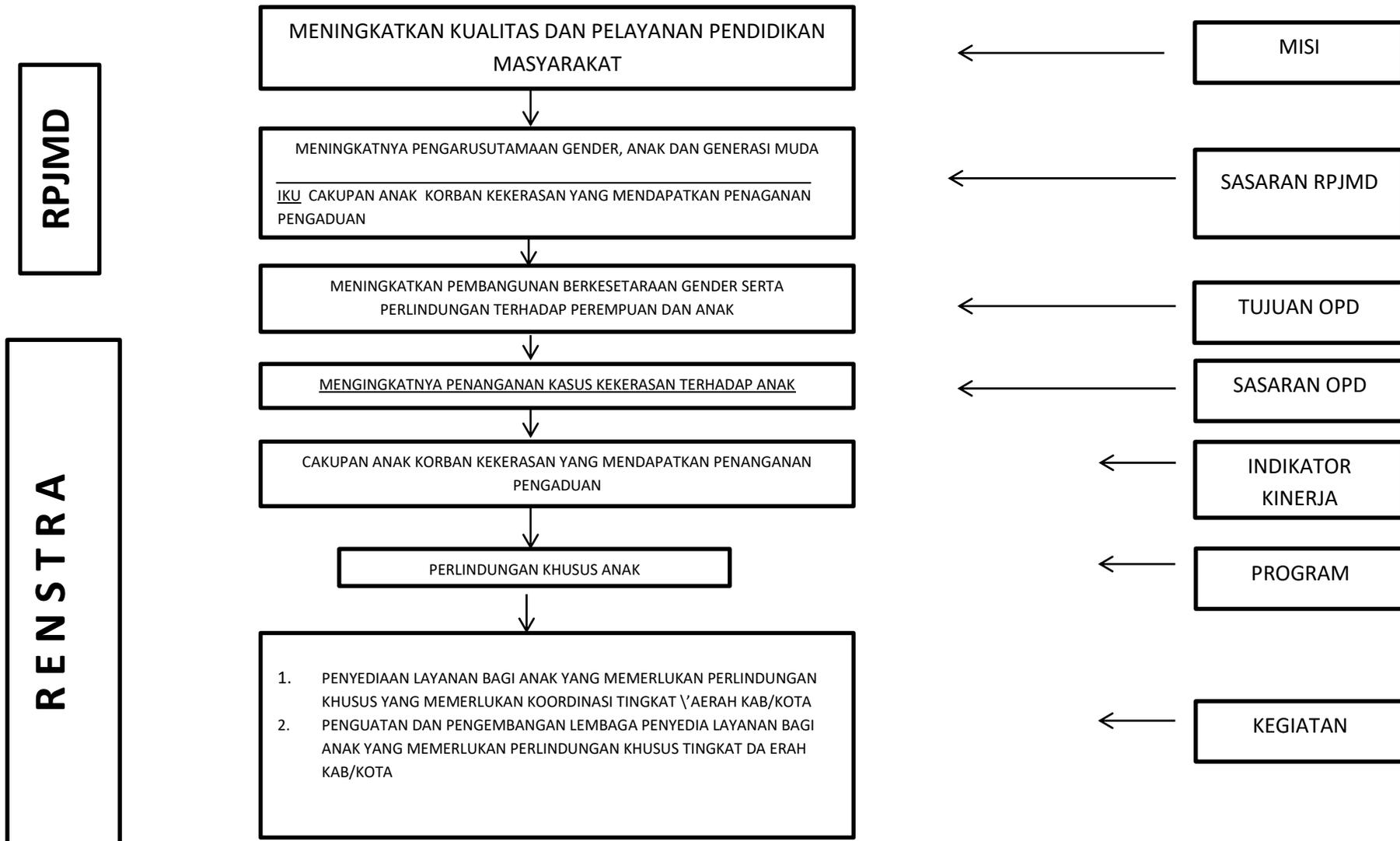
RENSTRA



Bandar Lampung, Februari 2024  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. MARYAMAH  
NIP. 19670620 199303 2 005

# CAS CADING DINAS PPPA



Bandar Lampung, Februari 2024  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. MARYAMAH  
NIP. 19670620 199303 2 005

VISI

"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KEMAKMURAN RAKYAT"

MISI KE-6

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN, PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, BERORIENTASI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENDUKUNG INVESTASI.

SASARAN:

MENINGKATNYA PENERAPAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

INDIKATOR SASARAN:

- 1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI
2. HASIL EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK

SASARAN: 1
MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN.
INDIKATOR SASARAN:
1. PERSENTASE OPD YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
2. Persentase Peningkatan Ketrampilan Perempuan

SASARAN: 2
MENINGKATNYA CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK.
INDIKATOR SASARAN:
Tingkat capaian Kota Layak anak

SASARAN: 3
MENINGKATNYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERSELESAIKAN
INDIKATOR SASARAN:
PERSENTASE KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERSELESAIKAN.

SASARAN: 4
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD
INDIKATOR SASARAN:
MENINGKATNYA NILAI SAKIP HASIL EVALUASI OLEH INSPEKTORAT

SASARAN: 5
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PPPA
INDIKATOR SASARAN:
1. PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR OPERSIONAL OPD
2. PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN INVENTARIS KANTOR
3. TERSEDIA NYA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN YANG TEPAT WAKTU

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
INDIKATOR KINERJA:
1. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
2. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
INDIKATOR KINERJA:
Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
INDIKATOR KINERJA:
1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
3. Rasio KDRT yang Tertangani
4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
INDIKATOR KINERJA:
1. KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI KOTA LAYAK ANAK
2. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
INDIKATOR KINERJA:
1. CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN
2. PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
INDIKATOR KINERJA:
1. CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN
2. PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA ORGANISASI
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI KEPALA ORGANISASI

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETERAPAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT KABUPATEN
INDIKATOR KINERJA:
1. PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA
INDIKATOR KINERJA:
1. Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA ORGANISASI
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI KEPALA ORGANISASI

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETERAPAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT KABUPATEN
INDIKATOR KINERJA:
1. PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA
INDIKATOR KINERJA:
1. Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERHADAP DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN
2. PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN PENANGANAN PENGADUAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN
2. PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA

PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN PENANGANAN PENGADUAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF
2. PERSENTASE ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2. JUMLAH ANAK YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA